

ABSTRAK

IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN NON TAHAPAN PADA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Oleh

Junia Simbolon

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi penyelenggara pemilu yang tidak lepas dari adanya tindak pelanggaran Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu ini merupakan tugas penting Bawaslu. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung dalam meningkatkan pengawasan non tahapan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi strategi oleh Hunger dan Wheelen (2020) meliputi 3 indikator yaitu 1) aktor pelaksana strategi, 2) pelaksanaan strategi, dan 3) pengelolaan sumber daya manusia. Temuan penelitiannya adalah 1) Aktor pelaksana internal dan eksternal telah bekerjasama dengan baik sehingga menciptakan sinergi yang baik dalam implementasi strategi, 2) pelaksanaan strategi yang sudah cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala di dalamnya yaitu pada aspek program, sarana dan prasarana yang belum memadai pada Pojok Pengawasan dan kurangnya tindakan keberlanjutan dari program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan masih terdapat prosedur beberapa program belum terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, 3) pengelolaan sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Saran peneliti terhadap Bawaslu Provinsi Lampung meliputi: a) mewadahi para alumni kader SKPP sebagai bentuk tindak keberlanjutan SKPP tersebut, b) melengkapi sarana dan prasarana Pojok Pengawasan, c) mendokumentasikan prosedur dari program sosialisasi pengawasan partisipatif, dan pojok pengawasan, d) perlu adanya evaluasi rutin untuk mengetahui kegiatan yang belum maksimal dan mencegah miskomunikasi antar pegawai dan pimpinan atau atasan.

Kata kunci: Implementasi Strategi, Bawaslu Provinsi Lampung, dan Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF LAMPUNG PROVINCE IN IMPROVING NON-STAGE SUPERVISION IN THE 2024 PRESIDENTIAL & VICE PRESIDENTIAL ELECTION

By

Junia Simbolon

Lampung Province is one of the election organizing provinces which is not free from election violations. In Law Number 7 of 2017 concerning Elections, supervision of the implementation of elections is an important task of Bawaslu. This research aims to analyze the strategy of the Lampung Province General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in increasing non-stage supervision in the presidential and vice presidential elections in 2024. This research method uses descriptive research with a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. This research uses the strategy implementation theory by Hunger and Wheelen (2020) which includes 3 indicators, namely 1) strategy implementing actors, 2) strategy implementation, and 3) human resource management. The research findings are 1) Internal and external implementing actors have collaborated well thus creating good synergy in implementing the strategy, 2) the implementation of the strategy is quite good even though there are several obstacles in it, namely in the program aspect, inadequate facilities and infrastructure in the Supervision Corner and the lack of sustainable action from the Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) program, limited budget in implementing the strategy and there are still procedures for several programs that have not been well documented. Furthermore, 3) the human resource management of Lampung Province Bawaslu has been carried out well. The researcher's suggestions for the Lampung Province Bawaslu include: a) accommodating SKPP cadre alumni as a form of sustainability action for the SKPP, b) completing the facilities and infrastructure for the Pojok Pengawasan, c) documenting the procedures for the participatory supervision socialization program, and the pojok pengawasan, d) the need for regular evaluations to find out activities that are not optimal and prevent miscommunication between employees and leaders or superiors.

Keywords: Strategy Implementation, Lampung Province Bawaslu, and Election Supervision